



**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
MENGENAI KERJASAMA EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN RUANG ANGKASA
UNTUK MAKSUD DAMAI**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"),

BERKEINGINAN untuk memperkuat dan memperluas kerjasama kerjasama di bidang sains, teknologi dan pemanfaatan antariksa yang berdasarkan kepentingan bersama;

MEMPERTIMBANGKAN kepentingan bersama dalam meningkatkan pemanfaatan antariksa untuk maksud-maksud damai;

MENIMBANG ketentuan-ketentuan dalam Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, yang terbuka untuk aksesi pada 27 Januari 1967, serta Traktat-traktat dan Perjanjian-perjanjian Multilateral lainnya mengenai eksplorasi dan penggunaan antariksa dimana kedua Negara menjadi anggota;

SESUAI DENGAN hukum dan perundang-undangan nasional yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Tujuan

Para Pihak wajib mempromosikan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok di bidang eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa untuk maksud damai sesuai dengan hukum dan perundang-undangan masing-masing negara, konvensi-konvensi atau persetujuan-persetujuan internasional dimana kedua Negara menjadi anggota dan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara umum.

PASAL 2

Ruang Lingkup Kerjasama

1. Kerjasama berdasarkan Persetujuan ini dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang sebagai berikut:
 - (a) Penelitian dan pembangunan satelit-satelit eksperimen untuk tujuan ilmiah, satelit-satelit penginderaan jauh, dan satelit-satelit komunikasi;
 - (b) Jasa-jasa peluncuran, penjejakan dan pengendalian satelit-satelit termasuk manajemen dan operasi di orbitnya;
 - (c) Penelitian, pembangunan, penggunaan dan pemanfaatan sistem ruas bumi satelit;
 - (d) Penelitian sains antariksa;
 - (e) Pemanfaatan dan saling berbagi data satelit penginderaan jauh.
2. Bidang-bidang kerja sama tambahan wajib ditentukan dengan kesepakatan bersama antara Para Pihak.

Pasal 3

Bentuk-bentuk Kerjasama

1. Kerjasama berdasarkan Persetujuan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:
 - (a) Penelitian dan pengembangan bersama;
 - (b) Pelatihan, konsultasi ahli dan pertukaran teknisi-teknisi;
 - (c) Pertukaran informasi ilmiah;
 - (d) Seminar-seminar dan konferensi-konferensi akademik yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh Para Pihak.
2. Bentuk-bentuk kerja sama tambahan wajib ditentukan dengan kesepakatan antara Para Pihak.

Pasal 4

Badan Eksekutif

1. Badan Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pengkoordinasian kerja sama dalam rangka pelaksanaan Persetujuan ini adalah:
 - (a) Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
 - (b) Untuk Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok: Administrasi Antariksa Nasional Tiongkok (CNSA)Dalam hal salah satu Pihak menetapkan Badan Eksekutif lainnya, Pihak tersebut wajib dengan segera memberitahukan penetapan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis melalui saluran diplomatik.
2. Badan Eksekutif dapat menunjuk organisasi lain (selanjutnya disebut sebagai "Organisasi Kerjasama") untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama.

Pasal 5

Komite Bersama

1. Dalam kerangka Persetujuan ini, Para Pihak wajib membentuk suatu Komite Bersama. Komite Bersama wajib diketuai oleh Kepala LAPAN atau perwakilannya dan oleh Administrator CNSA atau perwakilannya. Anggota-anggota Komite Bersama wajib ditetapkan oleh ketua Komite Bersama dari masing-masing Pihak.
2. Pertemuan Komite Bersama wajib diselenggarakan secara bergantian di Indonesia dan di Tiongkok sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun atau pada saat pertemuan tersebut dianggap perlu. Komite Bersama dapat membentuk kelompok kerja apabila diperlukan, dan pertemuan kelompok kerja dapat diseleggarakan pada waktu yang tepat.

Pasal 6

Pertukaran Personil dan Peralatan

Para Pihak wajib memfasilitasi ijin masuk dan tinggal personil, dan ekspor dan impor peralatan dan bahan yang diperlukan dari Pihak lainnya, untuk pelaksanaan proyek-proyek kerja sama dibawah kerangka kerja Persetujuan ini.

Pasal 7

Pertukaran Informasi

1. Para Pihak wajib, melalui Badan Eksekutifnya, memfasilitasi pertukaran informasi dan data yang terkait kegiatan-kegiatan bersama dibawah Persetujuan ini.
2. Tidak ada satu Pihak pun atau Badan Eksekutifnya atau Organisasi Kerja samanya boleh mengungkapkan atau mengalihkan informasi apapun dari Pihak lainnya

atau Badan Eksekutifnya atau Organisasi Kerja samanya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis Pihak tersebut.

Pasal 8

Hak Kekayaan Intelektual

1. Setiap Kekayaan intelektual yang diperoleh oleh salah satu Pihak, Badan Eksekutifnya atau Organisasi Kerja samanya pada saat melaksanakan pekerjaan dibawah Persetujuan ini secara independen wajib dimiliki oleh Pihak tersebut atau Badan Eksekutifnya atau Organisasi Kerjasamanya.
2. Setiap Kekayaan intelektual yang diperoleh oleh Para Pihak, Badan Eksekutifnya atau Organisasi Kerjasamanya pada saat melaksanakan pekerjaan dibawah Persetujuan ini secara bersama-sama wajib dimiliki bersama oleh Para Pihak atau Badan Eksekutifnya atau Organisasi Kerja samanya.
3. Para Pihak, Badan Eksekutifnya atau Organisasi Kerjasamanya dapat membuat perjanjian-perjanjian terpisah mengenai penggunaan dan prosedur perlindungan untuk kekayaan intelektual yang dimiliki secara bersama-sama,
4. Tidak ada satu Pihak manapun boleh menyediakan hasil kerja bersama kepada pihak ketiga tanpa kesepakatan tertulis dari Pihak lainnya.

Pasal 9

Amandemen

Persetujuan ini dapat sewaktu-waktu diubah berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak dengan surat menyurat melalui saluran diplomatik.

Pasal 10
Penyelesaian Sengketa

1. Setiap sengketa yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan melalui konsultasi damai antara Badan Eksekutif dari Para Pihak atau melalui Komite Bersama.
2. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Badan Eksekutif dari Para Pihak atau melalui Komite Bersama, maka sengketa tersebut wajib diselesaikan melalui saluran diplomatik.

Pasal 11
Masa Berlaku, Durasi dan Pengakhiran

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal notifikasi terakhir di mana Para Pihak saling memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan konstitusional dan internal mereka untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun seterusnya, kecuali salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhirinya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Persetujuan ini.
3. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi rencana atau proyek-proyek kerja sama yang sedang dilaksanakan Para Pihak, kecuali Para Pihak menyepakati sebaliknya.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah mendapatkan kuasa penuh untuk menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di pada tanggal 2 Oktober tahun 2013, dalam rangkap dua, dalam bahasa Indonesia, Cina dan Inggris, seluruh naskah memiliki keaslian yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA



GUSTI MUHAMMAD HATTA
MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK



MA XINGRUI
MENTERI/KEPALA ADMINISTRASI
ANTARIKSA NASIONAL TIONGKOK



印度尼西亚共和国政府与中华人民共和 国 政府关于探索与和平利用外层空间的 合作协定

印度尼西亚共和国政府与中华人民共和国政府（下称双方），

希望在互利的基础上，加强和扩大在空间科学、技术和应用领域的合作，

注意到双方在促进和平利用外层空间方面的共同兴趣，

虑及 1967 年 1 月 27 日《关于各国探索和利用包括月球和其他天体在内的外层空间活动的原则条约》的规定，以及两国共同参加的关于探索和利用外层空间的其它多边条约和协定的规定，

遵守各自国家的现行法律法规，

达成协议如下：

第一条 合作目标

双方将依据各自国家的法律和法规、两国共同参加的国际条约和协定以及公认的国际法原则，促进两国在探索与和平利用外层空间方面的合作。

第二条 合作领域

一、根据本协定可开展以下领域的合作：

- (一) 科学试验卫星、遥感卫星和通信卫星的研制；
- (二) 卫星发射与测控服务，包括在轨运行与管理；
- (三) 卫星地面系统的研制、利用和应用；
- (四) 空间科学的研究；
- (五) 遥感卫星应用和数据共享。

二、其他领域的合作将由双方共同商定。

第三条 合作方式

一、根据本协定可通过以下方式实现合作：

- (一) 联合研究和开发；
- (二) 人才培训、专家咨询和技术人员的交流；
- (三) 科学信息的共享；
- (四) 联合举行研讨会和学术会议。

二、其他合作方式将由双方共同商定。

第四条 执行机构

一、双方各自指定执行机构负责执行本协定框架下有关合作的发展和协调，印尼方指定印尼航空航天研究院，中方指定中国国家航天局。

如果任何一方指定了其他执行机构，该方应及时通过外交途径以书面形式通知另一方。

二、双方执行机构可另行指定单位（以下称合作单位）实施本协定框架下的联合活动。

第五条 联合委员会

一、在本协定框架下，双方将组建联合委员会。联合委员会由印尼航空航天研究院主席或其代表和中国国家航天局局长或其代表共同担任主席。联合委员会成员由双方主席分别指定。

二、联合委员会会议应在中国和印度尼西亚轮流召开，每年至少举行一次或根据需要召开。根据合作需要，联合委员会可下设工作组，并适时召开工作组会议。

第六条 便利人员和设备交流

在本协定框架下，双方将为执行合作项目的有关人员入境或停留，以及从另一方进出口所需设备和材料提供便利。

第七条 信息交换

一、双方应该通过各自的执行机构，为在本协定下的联合的活动提供信息和数据交换便利。

二、未经提供方或其执行机构或合作单位书面同意，一方或其执行机构或合作单位从另一方或其执行机构或合作单位得到的信息，不得向第三方泄露和转让。

第八条 知识产权保护

一、一方、其执行机构或合作单位在本协定框架下独立完成的工作所产生的知识产权归该方、其执行机构或合作单位所有。

二、双方、其执行机构或合作单位在本协定框架下联合完成的工作所产生的知识产权归双方、其执行机构或合作单位共有。

三、双方、其执行机构或合作单位可另行签订协议，确定共有知识产权的保护程序及其使用方式。

四、任何一方未经另一方的书面同意，不得将合作工作成果提供给任何第三方。

第九条 修订

经双方协商一致，可通过外交途径随时以换文方式对本协定进行修订。

第十条 争议解决

一、在本协定实施过程中产生的争议应由双方执行机构或联合委员会友好协商解决。

二、如果争议未能通过双方执行机构或联合委员会解决，双方将通过外交途径解决。

第十一条 生效、期限和终止

一、本协定应在一方完成协定生效的本国宪法规定或内部规定程序后，通过外交途径以书面形式通知另一方。本协定在最后一份书面通知收到之日起生效。

二、本协定有效期为 5 年。在有效期满前 6 个月，如无任何一方通过外交途径书面通知另一方终止本协定，本协定将自动延期 5 年。

三、除非另有约定，本协定终止不影响双方已经执行但尚未完成的计划和合作项目。

下列代表，经各自政府授权签署本协定。

本协定于二〇一三年十月二日在雅加达签订，一式两份，
每份都用印尼文、中文和英文书就，三种文本同等作准。如
对本协定条款的解释出现分歧，以英文文本为准。

印度尼西亚共和国政府
代表



中华人民共和国政府
代表



古斯迪·穆罕默德·哈达

马兴瑞



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
ON COOPERATION IN THE EXPLORATION AND PEACEFUL USE OF OUTER SPACE

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China (hereinafter referred to as "the Parties"),

DESIRING to strengthen and extend cooperation in the fields of space science, technology and applications on the basis of mutual benefit;

TAKING INTO CONSIDERATION the mutual interest in enhancing the peaceful uses of outer space;

CONSIDERING the provisions of Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and the Other Celestial Bodies, open for accession on January 27, 1967, as well as the other treaties and multilateral agreements on the exploration and the use of outer space to which both countries are parties;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of respective countries;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Objectives

The Parties shall promote the cooperation between Indonesia and China in the exploration and peaceful use of outer space in accordance with the laws and regulations of each of the countries, international conventions or agreements to which both countries are parties and the generally recognized principles of international law.

ARTICLE 2

Areas of Cooperation

1. Cooperation pursuant to this Agreement may be carried out in the following areas:
 - (a) Research and manufacture of scientific experiment satellites, remote sensing satellites and communications satellites;
 - (b) Launch, tracking and control services for satellites including in-orbit operation and management;
 - (c) Research, manufacture, utilization and applications of satellite ground systems;
 - (d) Research on space science;
 - (e) Remote sensing satellite application and data sharing.
2. Additional areas of cooperation shall be determined by mutual agreement between the Parties.

ARTICLE 3

Forms of Cooperation

1. Cooperation pursuant to this Agreement may be carried out in the following forms:
 - (a) Joint research and development;
 - (b) Training, experts consultation and exchanges of technicians;
 - (c) Scientific information sharing;
 - (d) Seminars and academic conferences jointly held by the Parties.
2. Additional forms of cooperation shall be determined by mutual agreement between the Parties.

ARTICLE 4

Executive Agencies

1. The Executive Agencies responsible for the development and coordination of cooperation in pursuance of the implementation of this Agreement shall be:
 - a. For the Government of the Republic of Indonesia: the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN)
 - b. For the Government of People's Republic of China: the China National Space Administration (CNSA)In case of appointment by either Party of any other Executive Agencies, such Party shall without delay notify the other Party in writing through diplomatic channel of such appointment.
2. The Executive Agencies may appoint organizations (hereinafter referred to as "Cooperation Organizations") to carry out the joint activities.

ARTICLE 5

Joint Committee

1. In the framework of this Agreement, the Parties shall establish a Joint Committee. The Joint Committee shall be co-chaired by the Chairman of LAPAN or his representative and by the Administrator of CNSA or his representative. The members of the Joint Committee shall be appointed respectively by the co-chairs of each Party.
2. The Joint Committee meeting shall be held alternately in Indonesia and in China at least once a year or when it is considered necessary. The Joint Committee may set up a working group if necessary, and working group meetings may be held at proper time.

ARTICLE 6

Exchange of Personnel and Equipment

The Parties shall facilitate the entry and stay of personnel, and the export and import of the necessary equipment and materials from the other Party, for the implementation of the cooperation projects under the framework of this Agreement.

ARTICLE 7

Exchange Information

1. The Parties shall, through their Executive Agencies, facilitate the exchange of information and data regarding the joint activities under the Agreement.
2. Neither Party or its Executive Agency or Cooperation Organizations shall disclose or transfer to any third party any information obtained from the other Party or its

Executive Agency or Cooperation Organizations without their written consent.

ARTICLE 8

Intellectual Property Right

1. Any intellectual property acquired by one Party, its Executive Agencies or Cooperation Organizations while independently carrying out any work under this Agreement shall be owned by that Party, its Executive Agencies or Cooperation Organizations.
2. Any intellectual property acquired by the Parties, their Executive Agencies or Cooperation Organizations while jointly carrying out any work under this Agreement shall be jointly owned by the Parties, their Executive Agencies or Cooperation Organizations.
3. The Parties, their Executive Agencies or Cooperation Organizations may enter into separate agreements regarding the use and protection procedures for the jointly owned intellectual property.
4. Neither party shall provide to any third party the joint work achievements without the written consent of the other Party.

ARTICLE 9

Amendment

This Agreement may be amended at any time by mutual consent of the Parties by means of letter exchange through diplomatic channel.

ARTICLE 10

Dispute Settlement

1. Any dispute arising from the implementation of this Agreement shall be resolved through amicable consultation between the Executive Agencies of the Parties or by the Joint Committee.
2. If the dispute cannot be resolved by the Executive Agencies of the Parties or by the Joint Committee, it shall be resolved through diplomatic channels.

ARTICLE 11

Entry into Force, Duration and Termination

1. This Agreement shall enter into force on the date of the last notification in which the Parties notify each other in written through diplomatic channel that the constitutional or internal requirements for entry into force of this Agreement have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for period of 5 (five) years and shall automatically be extended for the subsequent for the same period, unless either Parties intends to terminate it by giving written notification to the other Party at least 6 (six) months before its expiration.
3. The termination of this Agreement shall have no effect on the plan and cooperation projects which have entered into execution by the Parties, unless the Parties agree otherwise.

DONE in duplicate in Jakarta on 2nd October 2013, in the Indonesian, Chinese and English languages, all three texts being equally authentic. In case there is any divergence of interpretation of this Agreement, the English language shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA



GUSTI MUHAMMAD HATTA
MINISTER FOR RESEARCH AND
TECHNOLOGY

FOR THE GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



MA XINGRUI
CHAIRMAN-MINISTER OF CHINA
NATIONAL SPACE ADMINISTRATION



Salinan naskah resmi
Certified True Copy

Nomor : 005/BK/TR/01/2014/CTC
Number



Abdulkadir Jallani
NIP : 19660318199303 1 001

Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Director for Economic and Social Cultural Treaties
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : Januari 2014
Date